

OTONOMI DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

INTISARI OTONOMI DAERAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

PROF DR. M. MAS'UD SAID, MM
Wakil Ketua Pengurus Pusat
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)

APA ESENSI OTONOMI DAERAH

- Penyerahan Kewenangan dari Pusat ke daerah berisi 18 urusan, antara lain pendidikan, investasi daerah, pertanian, koperasi, infrastruktur,
- Keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan potensi dan kekuatan sendir serta mengatasi masalah dengan kemandirian tertentu.

Mengapa Otonomi Daerah

- **DIPAKAI DAN DIAPLIKASIKAN DI 95% NEGARA ANGGOTA PBB (Laporan Bank Dunia, 1999, 2001, 2003)**
- **DIPERCAYA SEBAGAI OBAT MUJARAB mengatasi PENYAKIT PEMERINTAHAN (Rondinelli 2003, Turner 2003, Cheema 2003)**
- **DIANGGAP SEBAGAI BAGIAN DAN SYARAT DEMOKRATISASI (Cohen and Paterson, Rondinelli and Cheema 2003)**

Tetapi Ternyata Juga

- **WELL PLANNED BUT BAD IN IMPLEMENTATION**
(Cheema and Rondinelli, World Bank Report 1999, 2001, 2003)
- **DECENTRALIZATION** With In-adequate preparation
(Rondinelli 2000, Turner, said 2004)
- Decentralization with no standard of evaluation and monitoring (The World Bank Report, 2001)

ANGGAPAN LUAS BAHWA OTONOMI DAERAH

SEBAGAI SARANA DEMOKRATISASI

(Mark Turner dan David Hulme
(2003), Weale, World Bank)

KUALITAS DAN EFISIENSI PEMERINTAHAN

(Smith, Burki and Perry, World
Bank, Cohen and Paterson)

GOOD GOVERNANCE

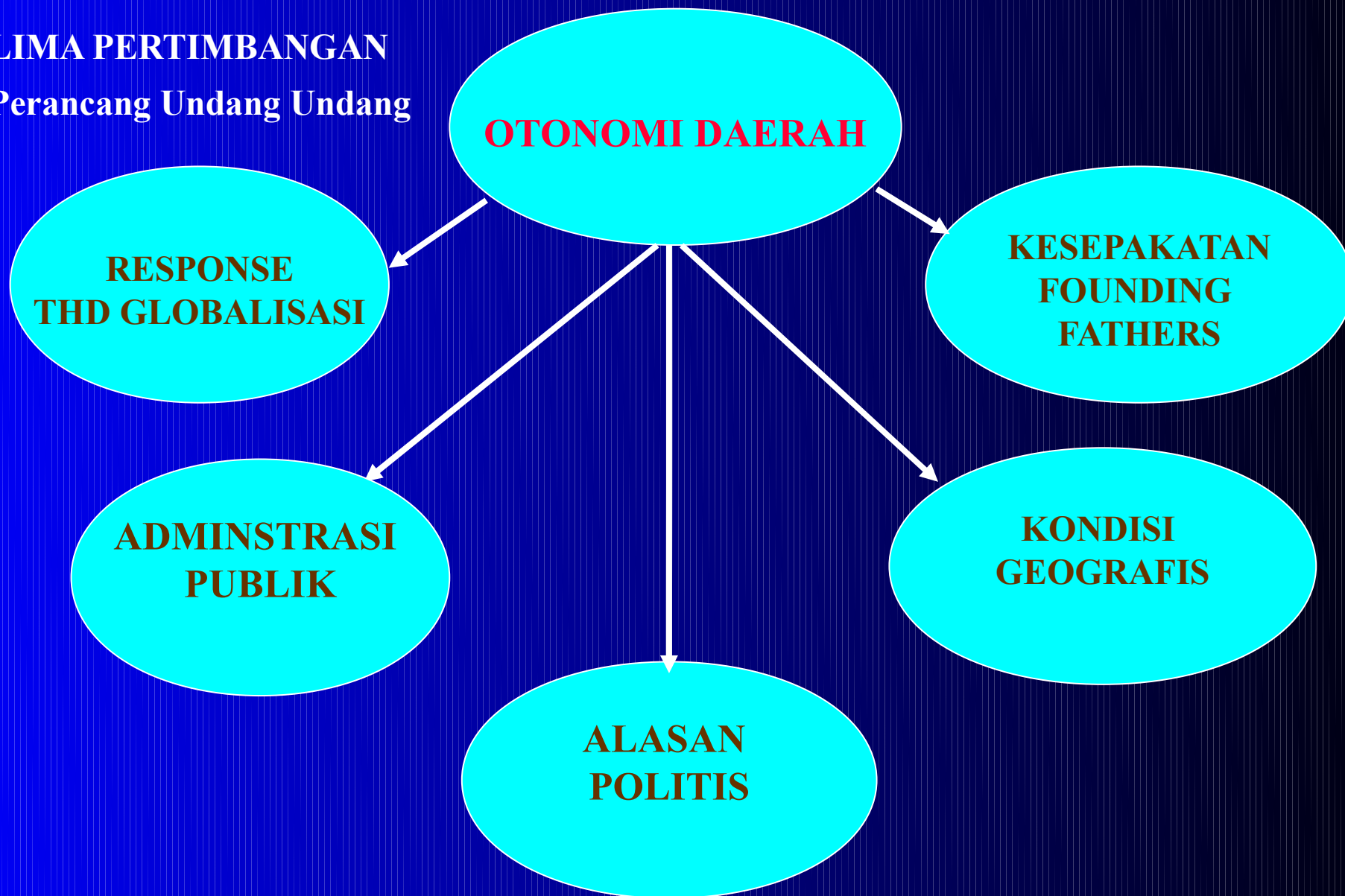
STABILITAS PEMERINTAHAN DAN PERSATUAN

(Treisman and World Bank,
1999)

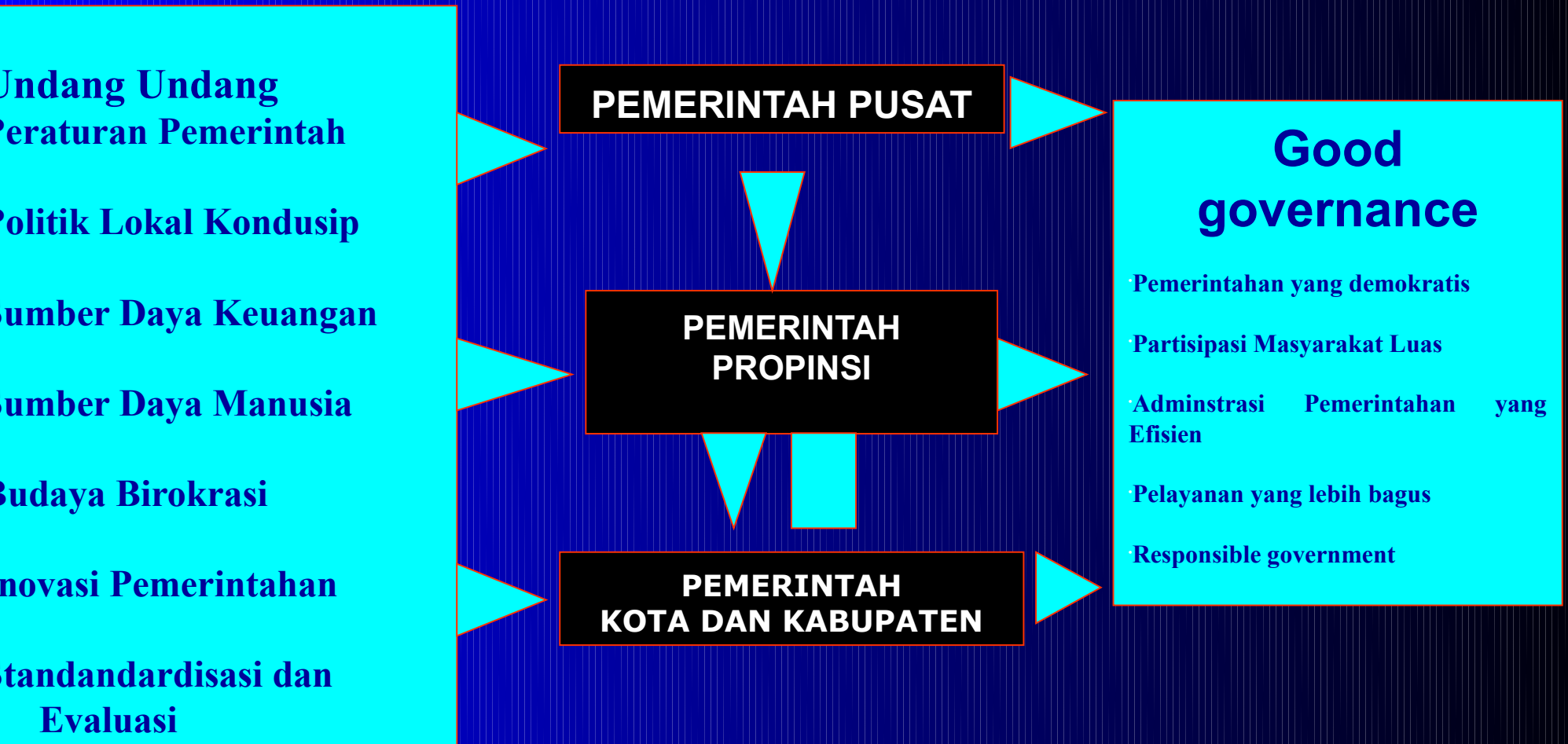
PEMBANGUNAN DAERAH DAN Memperbesar PARTISIPASI

(Randinelli and Cheema, Litvack,
Achmad and Bird)

LIMA PERTIMBANGAN
Perancang Undang Undang



ASUMSI DENGAN OTONOMI DAERAH



MASALAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA



DALAM KENYATAANNYA:

MASIH BANYAK KENDALA

Dalam Kenyataan di Indonesia

(Investigasi M.Mas'ud Said 2001-2004)

- Otonomi dibarengi korupsi di daerah
- Otonomi dibarengi keruwetan administrasi
- Di tahun tahun awal diikuti menurunnya kualitas pelayanan
- Pertengkaran Pusat – daerah,
- Pertengkaran daerah dengan daerah,
- Pertengkaran masyarakat dengan pejabat

Techno Structure, Middle Line dan Supporting Staff

DPRD

KEPALA DAERAH

JABATAN POLITIS

JABATAN KARIR

TECHNO STRUCTURE

MIDDLE LINE

SUPPORT STAFF

BAPPEDA

SEKDA

PERSONIL

KEUANGAN

UMUM

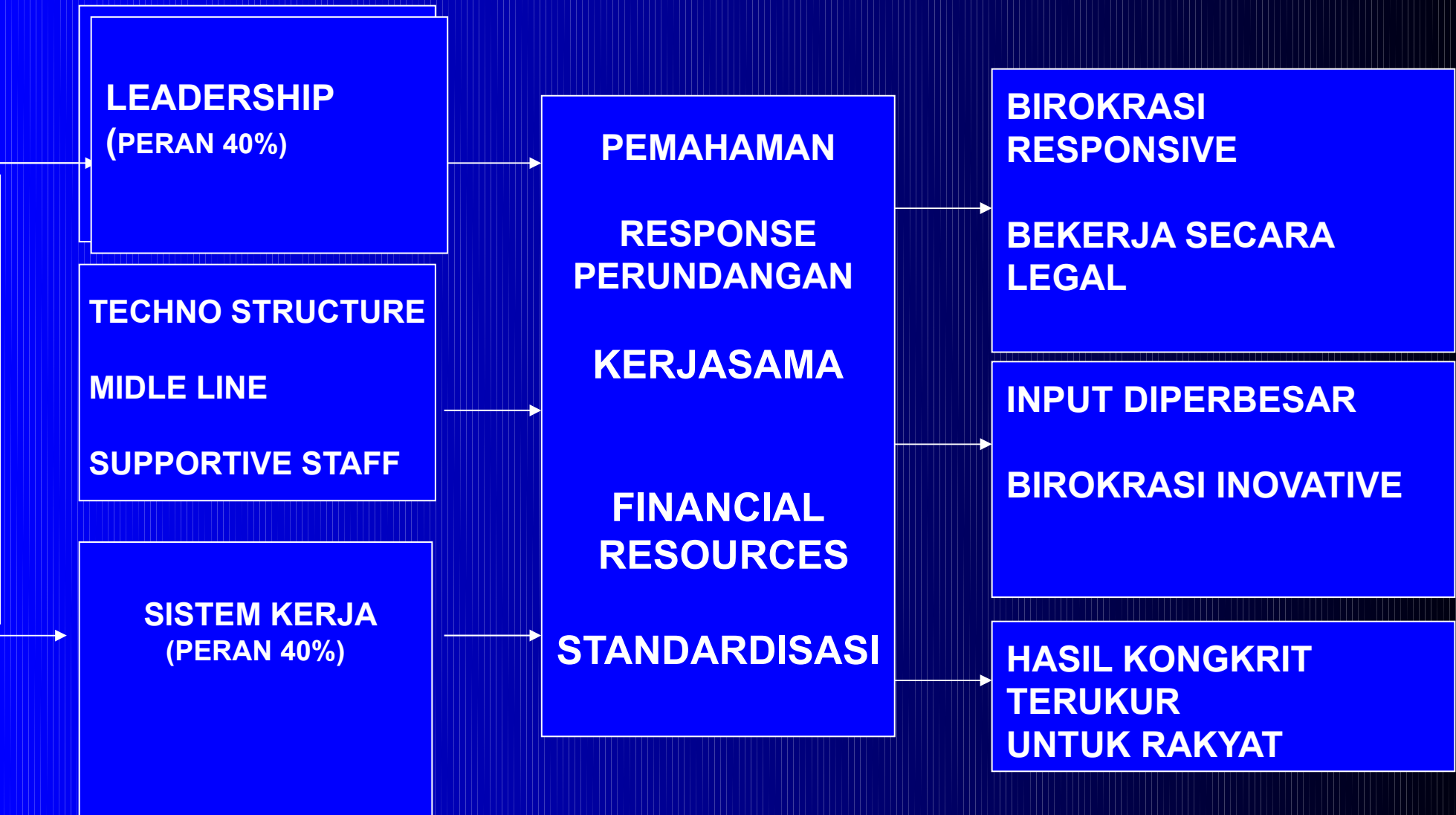
OPERATING CORE

DINAS-DINAS

**PELAYANAN
DASAR**

**SEKTOR
UNGGULAN**

BAYANGAN SUKSES OTONOMI DAERAH



Usulan awal

- PRIORITAS ke **SISTEM KERJA DAN INOVASI** daripada MENGANDALKAN “PENGALAMAN”
- PRIORITAS ke **MANAGERIAL SKILL** dan SUMBER DARI LUAR DARIPADA “RUTINITAS”
- PRIORITAS ke **PENGEMBANGAN HASIL** daripada ke CARA KONVENSIONAL YG LAMBAN

MASALAH MASALAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DI ERA OTONOMI
DAERAH

Penilaian Evaluative

- **Secara kelembagaan memiliki tantangan terbatasnya otoritas dan kewenangan. Kini UU SUSDUK telah dibahas untuk menggantikan UU SIUSDUK lama 22/2003.**
- **Secara sosial memiliki tantangan seiring besarnya harapan masyarakat, yang hampir tidak terbatas. Masyarakat telah terlanjur sulit memberi apresiasi positif terhadap performance lembaga dewan**
- **Secara politik sepertinya menjadi bempet eksekutif baik dalam tataran komunikasi antara pemerintah dengan pressure group. Menjadi sasaran tuntutan maupun evaluasi subjektive interest group.**
- **Akhir akhir ini beberapa survey mengatakan bahwa kinerja dewan menurut masyarakat masih belum memenuhi keinginan mereka. (Survey Tim UGM, 2005)**

PEMETAAN TUGAS POKOK

**FUNGSI
PENGANGGARAN**

**FUNGSI
PENGAWASAN**

**FUNGSI
LEGISLASI**

**DATA BASE
PERATURAN
PERUNDANGAN
DISIPLIN**

**KESEKRETARIATAN,
KEBERPIHAKAN
EFEKTIFITAS**

**DATA BASE, TIM AHLI,
AKSES DATA
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT**

1

OPTIMALISASI FUNGSI PENGANGGARAN

- **PENGUATAN DAYA DUKUNG PENGANGGARAN** →
 - DATA BASE, SEKRETARIAT YG TAHU MASALAH, TIM AHLI, DOKUMEN STRUKTUR APBD
- **PENGUATAN PARADIGMA PARTISIPATIF ANGGARAN** →
 - PERAN MASYARAKAT, DOKUMEN UNTUK PUBLIK, PRIVATE SECTOR, LEMBAGA SOSIAL
- **PENGUATAN PRINSIP PENGANGGARAN** →
 - DISIPLIN ANGGARAN, MANFAAT UNTUK RAKYAT, VALUE OF MONEY
- **KETERTUNDUKAN DENGAN PERATURAN KEUANGAN** →
 - UU 33/2004, KEPRES, KEPMEN 13/2007, KEPMEN 32/2008,
- **ANGGARAN KINERJA** →
 - ASPEK LEGAL, ASPEK MANFAAT, ASPEK PERTANGGUNG JAWABAN
- **ISSU KONTEMPORER** →
 - ANGGARAN POLITIS, TIDAK BERPIHAK KE RAKYAT,

2

OPTIMALISASI PENGAWASAN

- **PENGUATAN DAYA DUKUNG PENGAWASAN** →
 - DATA BASE, SEKRETARIAT YG TAHU MASALAH, TIM AHLI, DOKUMEN, ASPIRASI BAWAH
- **PENGUATAN PARADIGMA** →
- **KEBERPIHAKAN** →
 - UNTUK SIAPA, MENGAPA, YANG LALU BAGAIMANA,
- **PENGUATAN DISIPLIN EKSEKUTIF** →
 - DISIPLIN ANGGARAN, MANFAAT UNTUK RAKYAT, VALUE OF MONEY
- **KETERTUNDUKAN DENGAN TERATURAN PERUNDANGAN** →
 - UU 33/2004, KEPRES, KEPMEN
- **DAYA PAKSA, KEKUATAN USULAN** →
 - ASPEK LEGAL, ASPEK POLITIK, ASPEK PERTANGGUNG JAWABAN
- **ISSU KONTEMPORER** →
 - ANGGARAN POLITIS, TIDAK PERLU AKUR KE RAKYAT

3

OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI

- **INISIATIP DAN PERENCANAAN PERDA** →
 - DATA BASE, SEKRETARIAT YG TAHU MASALAH, TIM AHLI, DOKUMEN, ASPIRASI BAWAH
- **RANCANGAN PERDA DAN KEBERPIHAKAN** →
 - APA MISINYA, UNTUK SIAPA, MENGAPA, YANG LALU BAGAIMANA,
- **PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERDA** →
 - DISIPLIN PROSES, MANFAAT UNTUK RAKYAT,
- **PRODUKTIFITAS PEMBUATAN** →
 - PRODUKTIFITAS, CAKUPAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH
- **KUALITAS PERDA, KEKUATAN USULAN** →
 - BERKUALITAS, ASPEK PERTANGGUNG JAWABAN
- **ISSU KONTEMPORER** →
 - POLITISASI PEMBANGUNAN TIDAK

Seorang ahli organisasi yang bernama Karl W. Deutsch mengatakan

- Fungsi ELIT PEMERINTAHAN itu laksana Nahkoda Kapal
- Dalam kaitan ini, nahkoda kapal seharusnya selalu mengetahui dengan tepat : Kemana tujuan kapal itu berlayar, dimana sekarang posisinya, dan bagaimana keadaan penumpangnya, mesin kapalnya, bagaimana kondisi gelombang dan arah angin
- Bahwa organisasi bahwa pemerintahan dalam era sekarang ini harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga tuntutan masyarakat yang begitu bertubi-tubi.

SOLUSI

SOLUSI 1

- PENYELARASAN PENGANGGARAN DAN SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN.
- PENGUATAN KESEKRETARIATAN, SISTEM KOMUNIKASI ANTARA DPRD DAN PEMERINTAHN
- KETERSEDIAAN INFORMASI, UPDATE PERUNDANGAN, DATA DAN FAKTA LAPANGAN
- KETERSEDIAAN TENAGA AHLI DAN TEAM